

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

- 4.1.1 Sistem rekrutmen dalam penentuan calon Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jambi bahwa penentuan kandidat oleh PDI Perjuangan di tingkat DPD tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kandidat, akhirnya hubungan kandidat-kandidat hanya sebatas komunikasi ditingkat Provinsi. Sehingga kemudian penentuannya kandidat harus komunikasi intens dengan partai politik di pusat artinya bersifat sentralis. Kemudian dalam penetapan calon bersifat tertutup dimana hanya diketahui oleh segelintir elit dan masifnya pertukaran lobi diantara kandidat dengan petinggi partai ditingkat pusat.
- 4.1.2 Hal yang melatarbelakangi PDI Perjuangan sangat pragmatis. Hasil penelitian menunjukkan sifat partai yang pragmatis dalam hal pengusungan pasangan calon, karena hanya melihat popularitas, modal ekonomi dan masif pertukaran lobi diantara kandidat dengan petinggi partai ditingkat pusat. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya sumber sumber pertukaran materil dimana keputusan penentuan kandidat tidak dilatarbelakangi oleh platform ideologi dan politik yang diantara partai politik memiliki kemiripan identitas. Sehingga banyak kader partai maupun tokoh yang layak dan dianggap mampu tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Dapat

dikatakan bahwa partai politik tidak menjalankan fungsinya dengan baik terutama dalam proses rekrutmen dan kaderisasi.

4.2 Saran

- 4.2.1 Perlu adanya keterbukaan pada proses rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik sehingga pada proses penetapan kandidat adanya transparansi proses- proses yang di lalui oleh kandidat untuk mendapatkan dukungan dari partai politik. Serta perlu adanya keterlibatan elit partai politik yang lebih banyak lagi dalam proses penyeleksian kandidat hingga penetapan kandidat. Kemudian partai di tingkat pusat dalam menetapkan calon kepala daerah harus mempertimbangkan rekomendasi dari partai ditingkat daerah.
- 4.2.2 Partai politik harus berorientasi dalam organisasi berbadan publik artinya tidak berbadan privat. Selanjutnya Memperhatikan secara utuh garis-garis perjuangan partai baik ideologi maupun patform yang telah diputuskan oleh partai. Kemudian perlu adanya persiapan matang yang harus dilakukan partai politik kepada kader internal partai untuk ikut serta terlibat pada proses kandidasi dalam menghadapi suatu pemilihan baik eksekutif dan legislatif, artinya keputusan penentuan calon harus berjenjang dimulai dari potensi-potensi kader. Karena apabila dalam proses kandidasi terlalu banyak bakal calon dari eksternal maka dapat dikatakan bahwasanya partai politik gagal dalam fungsi kaderisasi dan rekrutmen partai politik.